

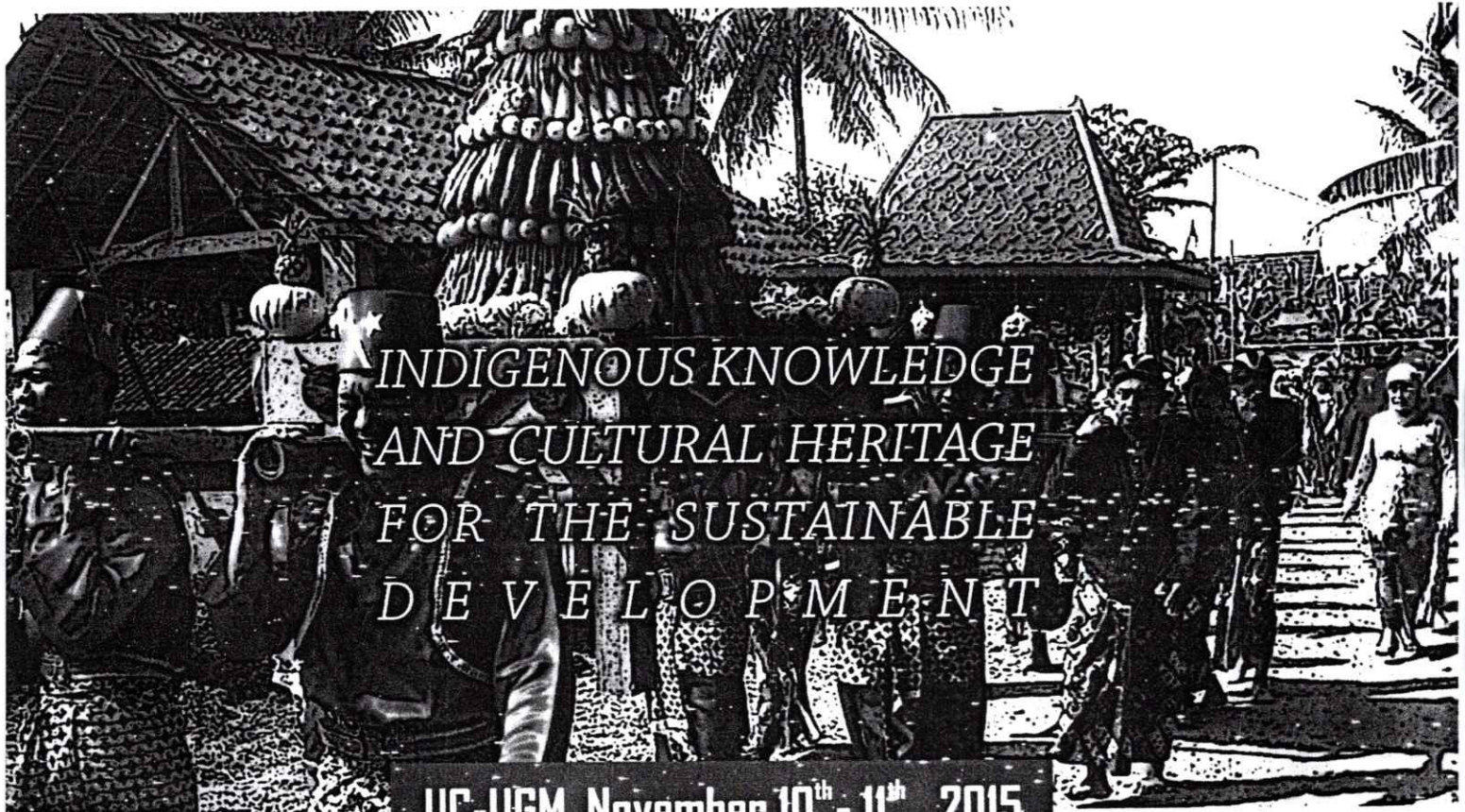
ISSN : 2354-8517

PROCEEDING

INTERNATIONAL CONFERENCE ON

*Nusantara  
Philosophy*

( I C N P ) 2015



INDIGENOUS KNOWLEDGE  
AND CULTURAL HERITAGE  
FOR THE SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT

UC-UGM, November 10<sup>th</sup> - 11<sup>th</sup>, 2015



Philosophy of Nusantara Laboratory  
Faculty of Philosophy, Gadjah Mada University  
Yogyakarta, Indonesia

Proceeding

International Conference  
on Nusantara Philosophy  
(ICNP) 2015

Indigenous Knowledge and Cultural Heritage  
For The Sustainable Development

---

ISSN : 2354-8517

Editor : Arqom Kuswanjono  
Tata Letak : Amin Ma'ruf  
Cover Design : Lima Design

Hak Cipta © 2015, Fakultas Filsafat UGM

Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta  
Gedung Unit C, Fakultas Filsafat UGM  
Jl. Olahraga, Bulaksumur, Yogyakarta  
Telp.: 0274-6491191, Faks.: 0274-515368  
Email: [filsafat@ugm.ac.id](mailto:filsafat@ugm.ac.id)  
Website: [www.filsafat.ugm.ac.id](http://www.filsafat.ugm.ac.id)

## ***SUSUMAN PANITIA***

- Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Filsafat UGM  
Dr. M. Mukhtasar Syamsuddin
- Pengarah : Dr. Rizal Mustansyir  
Dr. Misnal Munir  
Drs. Mustofa Anshori Lidinillah, M.Hum  
Dr. Sindung Tjahyadi
- Ketua Pelaksana : Dr. Arqom Kuswanjono
- Wakil Ketua : Dr. Rr. Siti Murtiningsih
- Sekretaris : Abdul Rokhmat Sairah, M.Phil.  
: Dwi Hernawan, S.IP.
- Acara dan Persidangan : Reno Wikandaru, M.Phil.  
Sri Mulasih, S.Sos.
- Publikasi dan Dokumentasi : Slamet Widodo, S.IP.  
Hananto Kusumajati
- Perlengkapan : Sunuwidada, S. Sos.  
Gunawan Joko Santoso
- Transportasi : Jaka Permadi  
Ferry Yusuf

## DAFTAR ISI

Susunan Panitia ~ iii

### PANEL DISCUSSION

- FILOSOFI SENI PEDALANGAN DAN PEWAYANGAN  
SEBAGAI WARISAN BUDAYA NUSANTARA ~ 1  
*Kasidi Hadiprayitno*
  
- NILAI-NILAI FILOSOFIS  
DALAM TATANAN HIDUP  
DI RUMAH GADANG MINANGKABAU ~ 15  
*Misnal Munir*  
*Rizal Mustansyir*  
*Supartiningsih*
  
- WAYANG: A MEDIA USED BY JAVANESE  
TO STUDY GENETICS SINCE THE OLD TIMES ~ 31  
*Budi Setiadi Daryono*
  
- THE CIPTAGELAR LOCAL WISDOM ~ 37  
*Bambang D*  
*Armaidy Armawi*
  
- TASAWUF NUSANTARA  
AND THE PRINCIPLE OF WAHDATULWUJUD ~ 41  
*Abdelaziz Abacci*

## IDEOLOGY, PANCASILA PHILOSOPHY AND PANCASILA

- STRATEGI KEBUDAYAAN PANCASILA ~ 47

*Agus Sutono*

- REFLEKSI DAN REKONSTRUKSI  
ILMU KE-PANCASILA-AN DI UGM ~ 55

*Heri Santoso*

*Rizal Mustansyir*

*Sindung Tjahyadi*

*Surono*

- LIBERALISASI DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY  
DARI PERSPEKTIF EKONOMI PANCASILA ~ 69

*Lailiy Muthmainnah*

- PANCASILA DI ANTARA TRADISIONALITAS  
DAN PEMBARUAN ~ 85

*Sudaryanto*

## ART, AESTHETICS, CULTURE, MEDIA, AND POP CULTURE

- AESTHETIC ASPECTS OF *PADUNG-PADUNG*  
AS PREFERENCE IN DESIGN DEVELOPMENT  
OF KARO TRADITIONAL JEWELRY ~ 95

*Ariani*

- MAKNA SIMBOLIK  
DEWA-DEWA DALAM SENI WAYANG:  
KAJIAN FILSAFAT MANUSIA ~ 107

*Budisutrisna*

- **KEBURUKAN WAJAH TOPENG BONDRES  
SEBAGAI OTONOMI KEINDAHAN  
DALAM IDENTITAS TOKOH RAKYAT ~ 119**

*Diah Asmarandani*

- **SEMAR MBANGUN KAHYANGAN:  
MASIH RELEVANKAH PEMIKIRAN ARENDT  
BAGI KEBUDAYAAN? ~ 133**

*Kardi Laksana*

- **HERBLORE INDONESIA  
TANTANGAN KEBERLANJUTANNYA  
PADA MASA MENDATANG ~ 147**

*Sri Utami*

- **RIAS DAN BUSANA PENGANTIN  
PAES YOGYA PUTRI  
DITINJAU DARI FILSAFAT SENI ~ 161**

*Sri Widayanti*

- **THE EXISTENCE OF PALEMBANG WAYANG:  
ACTUALIZATION OF CULTURAL WISDOM VALUES  
FOR THE PRESERVATION OF KNOWLEDGE IN INDONESIA ~ 177**

*Yulianingsih Riswan*

## MULTICULTURALISM AND GLOBALIZATION

- **THE SUSTAINABILITY OF MINANGKABAU ETHNIC  
IDENTITY PHILOSOPHY IN VIRTUAL COMMUNITY  
PALANTA URANG AWAK MINANGKABAU ~ 189**

*Elda Franzia*

*Yasraj Amir Piliang*

- SISTEM KEKERABATAN MATRILINEAL  
MASYARAKAT MINANGKABAU:  
RELEVANSINYA DENGAN KETAHANAN KELUARGA ~ 201 ✓  
*Supartiningsih*

## SOCIAL MOVEMENT AND GENDER

- CONFLICT RESOLUTION  
IN THE VALUE OF MULTICULTURAL SOCIETY TRADITION:  
A CASE STUDY OF BUGINESE COMMUNITY  
IN EAST KALIMANTAN ~ 221 ✓  
*Abdul Rokhmat Sairah Z.*
- MENGGANTUNGAN ASA PADA SANG RATU ADIL  
(TELAH FILOSOFIS ATAS KONSEP RATU ADIL  
PADA DIRI H.O.S. COKROAMINOTO) ~ 259  
*Agus Himmawan Utomo*
- THE MESSAGE OF CONFLICT RESOLUTION  
IN THE ORAL TRADITIONAL ART  
OF *SALAWAT DULANG* IN MINANGKABAU ~ 285  
*Febri Yulika*
- KONFLIK SOSIAL  
DALAM ADAT PERKAWINAN  
MASYARAKAT BELOBATANG-LEMBATA-NTT ~ 297  
*Hipolitus Kristoforus Kewuel*
- TINJAUAN FILSAFAT MANUSIA  
ATAS PRINSIP HARMONI MASYARAKAT DESA NGADISARI,  
TENGGER, JAWA TIMUR TERHADAP ALAM ~ 311  
*Septiana Dwiputri Maharani*

- THE PHILOSOPHY OF INDONESIAN “*PEMASYARAKATAN*” AND ITS PARADOXES ~ 323

*Iqrak Sulhin*

## INDUSTRY, ENVIRONMENT, AND DISASTER

- DAMPAK KEBAKARAN HUTAN TERHADAP KERUSAKAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI INDONESIA ~ 343

*Dinarjati Eka Puspitasari*

- MENYIMAK ALAM, MENKAJI DIRI: KEARIFAN LOKAL MELAYU RIAU DALAM MENGELOLA LINGKUNGAN PERSPEKTIF ETIKA LINGKUNGAN HIDUP ~ 361

*Irwandra*

- APPLICATION OF ECO FRIENDLY WOOD PRESERVATION BY PODSOLIC CLAY ~ 389

*Taman Alex*

*Rudi Djatmiko*

*Budi Winarni*

*M.Said Umar*

*Zainal Arifin*

- FILOSOFI AIR DALAM PANDANGAN HIDUP MASYARAKAT MELAYU SAMBAS: TINJAUAN SEMIOTIKA ~ 395

*Rizal Mustansyir*



## RELIGION AND RITUAL TRADITION

- RADICAL TRANSFORMATION  
IN MOSQUE ORNAMENTATION:  
UNIVERSALITY VERSUS HETEROGENEITY  
(CASE STUDY IN CITY MOSQUE OF CIREBON) ~ 423  
*Achmad Haldani D*
  
- C4: RUMUS MANUSIA NUSANTARA  
DALAM TASAWUF ISLAM ~ 441  
*Ammar Fauzi*
  
- THE HIDDEN MEANING OF *PRIHATIN* PRACTICE  
OF TARIKAT ULUWIYAH IN PESANTREN BAITURROHMAH  
MALANG, EAST JAVA  
(AN INVENTORY OF THE INDONESIAN SUFISM TREASURES) ~ 451  
*Farid*
  
- UPACARA SENI HODO  
SEBAGAI RITUAL KESUBURAN  
MASYARAKAT DUKUH PARIOPO SITUBONDO ~ 459  
*Panakajaya Hidayatullah*
  
- KESEHATAN JIWA  
MENURUT PARADIGMA ISLAM  
(KAJIAN BERDASARKAN AL QURAN DAN HADIST) ~ 473  
*Qurotul Uyun*
  
- *LAKU RITUAL*  
DALAM TRADISI PENCAK SILAT  
UNTUK KESELAMATAN ~ 483  
*Suryo Ediyono*

- *LOCAL WISDOM*  
DALAM TRADISI NU ~ 497 ✓  
*Syarif Hidayatullah*
  
- PERNIKAHAN DI PAGUYUBAN WARGA HARDO PUSORO:  
ANTARA RITUAL DAN KONSTITUSI ~ 525  
*Teguh Tri Wahyudi*
  
- PEREMPUAN, KEMISKINAN  
DAN KEARIFAN LOKAL MINANGKABAU ~ 541  
*Widia Fithri*

## ETHICS AND EDUCATION

- THE MORAL PHILOSOPHY  
OF GURINDAM DUA BELAS RAJA ALI HAJI:  
19<sup>TH</sup> CENTURIES MALAY'S CULTURAL HERITAGE  
FROM PENYENGAT ISLAND, RIAU ARCHIPELAGO ~ 551 ✓  
*L.N. Firdaus*  
*Syafsir Akhlus*
  
- AKSIOLOGI  
FILSAFAT JAWA  
TERKAIT PEMAHAMAN  
ILMU PENGETAHUAN KEDOKTERAN ~ 563  
*Judajana*
  
- PEMAHAMAN RASIONAL  
KARAKTER BANGSA INDONESIA  
DALAM TIGA TUTURAN ~ 567  
*Heri Suwignyo*

- STUDENT CHARACTER BUILDING AND DEVELOPMENT AT DEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY THROUGH THE VALUES OF *MARTUHAN-MARROHA-MARBISUK* ~ 579

*Mariana Simanjuntak*  
*Santi Manalu*

- BERPENDIDIKAN ETIKA:  
MENELUSURI JEJAK PENDIDIKAN YANG IDEAL ~ 589

*Maryaeni*

- DIMENSI AKSIOLOGIS  
AJARAN *SASTRAJENDRA HAYUNINGRAT PANGRUWATING DIYU*  
DALAM LAKON BIMA SEKTI DALANG KI TIMBUL HADIPRAYITNO  
CERMOMANGGOLO: RELEVANSINYA DENGAN PEMBANGUNAN  
KARAKTER BANGSA ~ 601

*Sri Suryati Soetardjo*  
*Koento Wibisono S.*  
*Kaelan*  
*Kasidi H*

- ENGAGING CHEMISTRY STUDENTS  
IN EDUCATION FOR SUSTAINABILITY  
IN ETHICAL DILEMMAS STORIES PEDAGOGY ~ 619

*Yuli Rahmawati*

- MEMBANDINGKAN AJARAN ETIKA KEUTAMAAN  
ANTARA *ASTHA BRATA* DENGAN TAOISME ~ 629

*Imam Wahyudi*

## POLITICS, DIPLOMACY, AND INTERNATIONAL RELATIONSHIP

- *KASEKTEN*:  
EPISTEMOLOGİ KEKUASAAN  
DALAM PANDANGAN DUNIA ORANG JAWA ~ 643

*Aryaning Arya Kresna*

- TINJAUAN ETIS  
DIMENSI STATIKA DAN DINAMIKA  
DALAM KEPEMIMPINAN MASYARAKAT MADURA ~ 655

*Ridwan Ahmad Sukri*

- REVOLUSI MENTAL DAN MANUSIA INDONESIA  
DALAM KAJIAN AKADEMIS-FILOSOFIS  
(REFLEKSI KRITIS ATAS PRAKSIS POLITIK  
Pemerintahan Jokowi) ~ 663

*Mukhtasar Syamsuddin*

# PEREMPUAN, KEMISKINAN DAN KEARIFAN LOKAL MINANGKABAU

*Widia Fithri<sup>1</sup>*

## Abstrak

Wajah perempuan Indonesia hari ini tidak jauh berbeda dengan wajah perempuan Indonesia tahun 1928. Data menunjukkan bahwa 63.7 % perempuan Indonesia berstatus miskin sekaligus sebagai pengemban tugas kepala keluarga alias tulang punggung keluarga. Perempuan miskin sesungguhnya jauh lebih berdampak buruk daripada laki-laki miskin, karena perempuan atau ibu berperan ganda dalam keluarga yang secara emosional lebih dekat dengan anak-anak. Mengurangi jumlah wanita miskin justru akan memunculkan efek berganda dalam meningkatkan kesejahteraan anak, yang menjadi generasi masa depan. Kesejahteraan wanita menjadi penentu utama dalam mewujudkan korelasi positif antarpertumbuhan dan pengentasan kemiskinan.

## A. Pendahuluan

Pembangunan kualitas hidup perempuan menjadi penting, mengingat kualitas hidup perempuan sangat menentukan generasi yang akan datang. Hal yang sangat mendasar dalam rangka mewujudkan kualitas hidup perempuan adalah masalah kesejahteraan perempuan, masalah pendidikan dan kesehatan serta menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Informasi yang dirilis oleh WCC Nurani di Padang pada akhir tahun 2013 tingkat kasus kekerasan terhadap perempuan masih tergolong tinggi. Salah satu faktor pemicunya adalah tidak adanya payung hukum yang jelas untuk tindakan ini. Lain halnya dengan informasi dari Ketua P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang, Nelvi Irwan Prayitno mengatakan, meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kondisinya semakin memprihatinkan, namun yang terungkap kepermukaan sangat sedikit, ibarat gunung es.

Pada tahun 2012 tercatat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di P2TP2A Sumbar sekitar 155 kasus, terdiri dari 95 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 60 kasus terjadi pada anak. Sedangkan kasus yang dilayani P2TP2A Sumbar tahun 2013 sebanyak 23 kasus yang terdiri dari 10 kasus kekerasan pada perempuan dan 13 kasus kekerasan pada anak, pada kondisi terakhir Oktober 2014 tercatat 48 kasus yang terdiri dari 40 kasus perempuan dewasa, 1 laki-laki dewasa dan 7 anak-anak.

---

<sup>1</sup> Jurusan Aqidah Filsafat, Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang; widia\_fithri@yahoo.co.id.

Dalam catatan Direktorat Serse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat hampir semua kasus kekerasan terhadap perempuan dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi. Silvia Hanani : 2008 menjelaskan bahwa Hal ini menjadi indikator tentang tidak terbentuknya lagi sistem ekonomi produktif perempuan, karena telah dicabutnya tanah ulayat sebagai aset ekonomi mandiri perempuan oleh pihak-pihak yang tidak dibolehkan oleh adat. Dengan ketidakmandiriannya itu, perempuan sangat rentan mengalami kasus kekerasan. Inilah sebuah potret realitas faktual yang sangat jelas menunjukkan bahwa kasus KDRT yang dialami oleh perempuan, sangat dipengaruhi oleh ketidakmandirian ekonomi perempuan, sehingga ia rela mengalami kekerasan oleh suami atau pihak lain. Perempuan tidak punya pekerjaan dan tidak memiliki aset usaha, tidak mandiri secara ekonomis. Ketidakmandirian dari segi ekonomi ini ternyata berpengaruh terhadap sikap yang diambil perempuan jika dia mengalami kekerasan. Perempuan lebih memilih bersikap diam terhadap kasus yang menimpanya, sebab dengan sikapnya yang seperti itu kebutuhannya masih bisa dipenuhi oleh suami atau pihak yang bertanggungjawab terhadap kebutuhannya. Ketergantungan yang tinggi inilah yang menyebabkannya sangat rentan dengan kasus KDRT.

Nelvi Irwan Prayitno menjelaskan pemerintah menyadari bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah saja, melainkan harus ada kerja sama sinergis banyak pihak terkait dengan fungsi terpadu dan saling membantu.” Hal ini disampaikan pada saat menghadiri MOU P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang dengan mitra kerja terkait. Pemerintah bertekad memberikan pelayanan terbaik bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan berhak mendapatkan penanganan kesehatan dan penyidikan dari kepolisian. Hal ini tentunya membutuhkan visum *et repertum* untuk mendapatkan bantuan hukum. Berdasarkan pengalaman di lapangan, korban umumnya berasal dari kalangan menengah ke bawah, dimana mereka tidak mampu membiayai urusan perkara tersebut.

Wajah perempuan Indonesia hari ini tidak jauh beda dengan wajah perempuan Indonesia tahun 1928. Kebebasan perempuan yang digadang-gadang memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh kesempatan di berbagai sektor, baik politik, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya, dalam kenyataan tidak berdampak signifikan dalam mengangkat harkat derajat perempuan. Data menunjukkan bahwa 63.7 % perempuan Indonesia berstatus miskin sekaligus mengemban tugas sebagai kepala keluarga alias tulang punggung keluarga. Demikian diungkapkan oleh Yefri Heriani dari LSM Nurani Perempuan Padang dalam acara workshop yang diadakan Pimpinan Aisyiah Wilayah Sumatera Barat.<sup>2</sup> Apa pentingnya membicarakan perempuan dalam kaitannya dengan kemiskinan? Bagaimana konsep nilai kearifan lokal Minangkabau menjadi landasan nilai bagi masalah perempuan dan kemiskinan ?

---

<sup>2</sup> Workshop yang diorganisir oleh Pimpinan Wilayah Aisyiah Sumatera Barat, 17 April 2015.

## B. Metodologi

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Objek material penelitian ini adalah Perempuan, Kemiskinan dan Kearifan lokal Minangkabau. Objek Formal penelitian ini adalah Filsafat Nusantara dalam hal ini Filsafat Minangkabau. Analisa data digunakan dengan analisis deskriptif. Studi kasus ini mengambil tempat di kota Padang dengan alasan kota Padang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Sumatera Barat. Saat ini tercatat jumlah penduduk miskin, hampir miskin dan rawan miskin di Sumbar berjumlah 410. 102. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar Rahmad Sani. "Kota Padang paling banyak jumlah penduduk miskinnya, disusul Pesisir selatan dan Agam. Data itu merupakan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 (<http://www.jpnn>) Tujuan penelitian ini adalah 1) membangun serta mendorong peningkatan kualitas hidup perempuan untuk ikut serta dan berperan aktif dalam memelihara dan melestarikan ketahanan keluarga, karena keluarga menjadi episentrum dalam perbaikan masyarakat. 2) Menggali dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal Minangkabau dalam merespon perubahan yang terjadi pada masyarakat terutama penguatan peran serta perempuan dalam membangun bangsa.

## C. Kemiskinan dan Perempuan

Kemiskinan yang asal katanya *miskin* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah), juga disebutkan bahwa kemiskinan sebagai "hal miskin" atau "keadaan miskin". Sedangkan miskin absolut adalah situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum.

Bappenas memberikan pengertian bahwa kemiskinan diartikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat antara lain : tidak terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Dari defenisi kemiskinan yang ditampilkan secara umum, kemiskinan mengacu pada aspek ekonomis mengarah pada ketiadaan, meskipun dalam realitasnya kemiskinan itu tidak berwajah tunggal namun sangat kompleks dan multidimensi.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2004-2009 tidak hanya dipahami sebagai ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani hidupnya secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, dan rasa aman dari perlakuan atau ancaman kekerasan.

Kemiskinan diklasifikasikan sebagai kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan, sedangkan kemiskinan absolut adalah situasi rumahtangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Rumah tangga yang mengalami kemiskinan absolut berada dalam situasi kelaparan kronis, tidak mampu mengakses sarana kesehatan, tidak memiliki sumber air bersih dan sanitasi yang baik, tidak mampu menyekolahkan sebagian atau semua anak dalam rumahtangga, dan mungkin tidak memiliki tempat perlindungan dasar. (BPS, 2008 : 5).

*Pengukuran Kemiskinan.* BPS menetapkan 8 variabel yang dianggap layak dan operasional untuk penentuan kriteria rumah tangga miskin. Kedelapan variabel tersebut adalah :

- 1). Luas lantai per kapita <8 m<sup>2</sup>
- 2). Jenis lantai adalah tanah
- 3). Air bersih berasal dari sumber yang tidak terlindung.
- 4). Tidak ada jamban/WC
- 5). Tidak memiliki aset
- 6). Pendapatan total kurang dari 350.000 per bulan
- 7). Persentase pengeluaran untuk makanan > 80% pendapatan
- 8). Konsumsi lauk pauk tidak ada/ walaupun ada tidak bervariasi

BPS mengukur kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2008)

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2010 sebesar 5,93%. Angka ini lebih rendah dibandingkan nasional, dimana pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,10%. Rendahnya pertumbuhan ekonomi kemungkinan menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di Sumatera Barat. Kemudian, rasio gender Sumatera Barat juga cukup tinggi yaitu sebesar 50,39% pada tahun 2010. Artinya jumlah penduduk perempuan melebihi jumlah penduduk laki-laki. Fenomena ini kemungkinan menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Sumatera Barat, sebagaimana teori ekonomi mengatakan bahwa semakin tinggi jumlah



penduduk perempuan menyebabkan tingginya angka kemiskinan (Reni Mustika : 2012).

Beban kemiskinan paling besar terletak pada kelompok-kelompok marjinal dan kaum perempuan yang pada umumnya merupakan pihak yang banyak dirugikan. Dalam rumah tangga miskin, mereka sering menjadi pihak yang menanggung beban kerja yang lebih berat dari pada kaum pria. Demikian pula dengan anak-anak, mereka juga menderita akibat adanya ketidakmerataan beban kerja. Kualitas hidup masa depan mereka terancam oleh karena tidak tercukupinya gizi, pemerataan kesehatan dan pendidikan (Bahri, 2005).

Beberapa studi ekonomi makro menegaskan bahwa wanita yang lebih berpendidikan akan memberikan sumbangan yang lebih baik bagi kesejahteraan generasi muda melalui penurunan angka kematian bayi dan anak-anak, tingkat kesuburan yang lebih rendah, dan peningkatan gizi anak-anak. Pada tingkat ekonomi makro, salah satu hasil studi menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu persen kepesertaan wanita dalam pendidikan sekolah menengah menghasilkan 0,3 persen peningkatan dalam pendapatan per kapita (Dollar dan Gatti, 1999: dalam Michael Bamberger dkk., hal. 341).

Ketidaksetaraan peran antara perempuan dan laki-laki dipengaruhi oleh berbagai norma yang berlaku dalam masyarakat, penafsiran agama dan konstruksi sosial budaya yang mengatur alokasi peran, atribut, stereotip, hak, kewajiban, tanggung jawab dan persepsi terhadap laki-laki maupun perempuan. Marjinalisasi, diskriminasi dan subordinasi terhadap kaum perempuan membuat daya saing perempuan dalam berbagai aspek kehidupan menjadisangat lemah. Hal ini menyebabkan kondisi perempuan makin memprihatinkan (Susanti, 2006).

Kombinasi ketiadaan akses pada unsur ekonomi, sosial, dan kuasa yang dihadapi oleh perempuan miskin menyebabkan terjadinya peningkatan "*feminization of poverty*". Pemiskinan perempuan secara langsung terkait pada status ekonomi rendah, termasuk tidak adanya peluang ekonomi dan otonomi, kurangnya akses terhadap sumberdaya ekonomi (termasuk kredit, pemilikan lahan dan pewarisan), kurangnya akses ke pendidikan dan jasa pendukung dan minimnya partisipasi mereka dalam penentuan keputusan. Kemiskinan juga dapat mendorong perempuan kedalam situasi rawan pada eksploitasi seksual (Susanti, 2006).

Sumatera Barat khususnya Kota Padang yang memiliki budaya *Minangkabau* yang dikenal memiliki sistem matrilineal ternyata tidak menjamin tingginya peran dan partisipasi perempuan khususnya dalam ranah publik. Akses dan kontrol perempuan baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap sumberdaya yang ada disekitarnya masih lebih banyak ditentukan oleh orang-orang yang berada diluar dirinya. Peluang perempuan untuk mendapatkan modal secara mandiri masih terhalang oleh syarat izin. Disamping itu, beban kemiskinan mempersempit peluang untuk dapat memajukan dan meningkatkan kapasitas diri (LP2M, 2006)

Perempuan miskin sesungguhnya jauh lebih berdampak buruk dari pada laki-laki miskin, karena perempuan atau ibu berperan ganda dalam keluarga yang secara emosional lebih dekat dengan anak-anak. Peran ganda perempuan sebagai penentu urusan dapur keluarga yang bergayut didirinya segala urusan keluarga termasuk anak-anak. Beberapa hasil riset menunjukkan bahwa kemiskinan di kalangan wanita mempengaruhi kesehatan dan perkembangan anak lebih dari pada pria. Ketika penghasilan wanita meningkat dan jumlah wanita miskin berkurang, anak-anak juga memperoleh manfaat dari perkembangan itu karena dibandingkan dengan pria, wanita lebih banyak membelanjakan uang mereka untuk keluarga dan khususnya untuk anak-anak. Dengan kata lain, mengurangi jumlah wanita miskin justru akan memunculkan efek berganda dalam meningkatkan kesejahteraan anak, yang menjadi generasi masa depan. Kesejahteraan wanita menjadi penentu utama dalam mewujudkan korelasi positif antarpertumbuhan dan pengentasan kemiskinan.

#### D. Perempuan Dalam Kearifan Lokal Minangkabau

Perempuan dalam budaya Minangkabau di sebut dengan Bundo kanduang. Dalam sistem kekerabatan Minangkabau yang matrilineal Bundo kanduang punya kedudukan central dan memiliki fungsi strategis. Bundo Kandang dalam pepatah Adat dinukilkan sebagai berikut:

*Bundo kanduang  
Limpapeh rumah nan gadang  
Sumarak dalam nagari  
Hiasar di dalam kampung  
Nan tahu di malu sopan  
Kamahias kampung jo halaman  
Sarato koto jo nagari  
Sampai ka balai jo musajik  
Sarato jo rumah tanggo*

*Dihias jo budi baiak  
Malu sopan tinggi sakali  
Baso jo basi bapakaian  
Nan gadang basa batuah  
Kok hiduik tampek banazar  
Kok mati tampek baniat*

*Tiang kokoh budi nan baiak  
Pasak kunci malu jo sopan  
Hiasan dunia jo akhirat  
Auih tampek mintak aia  
Lapa tempek mintak nasi*

Bundo kanduang  
Limpapeh rumah nan gadang  
Menyemarakkan Nagari  
Hiasan dalam kampung  
Yang punya sopan santun  
Yang menghiasi kampung dan hal  
laman serta nagari  
sampai ke pasar dan mesjid  
serta rumah tangga

yang memiliki budi baik  
yang memiliki sopan santun  
Melekat didirinya budi bahasa  
yang Agung dan Terhormat  
Selagi hidup tempat bernazar  
Setelah mati tempat berniat

Tiang utama budi yang baik  
Menjaga rasa malu dan kesopanan  
Hiasan dunia dan akhirat  
Tempat meminta air ketika haus  
Tempat meminta nasi jika lapar

Bundo kanduang merupakan lambang kehormatan dalam kaumnya terutama dalam nagari. Lambang kehormatan tersebut bukan hanya didasarkan pada kodratnya atau bentuk fisiknya, tetapi lebih ke bentuk kepribadiannya yang disebut dengan budi. Ibu menjadi hiasan dalam kampung, yang berasal dari kepribadiannya dalam arti ibu mengerti tatacara, sopan santu, budi pekerti, dan memelihara diri dan kaumnya. Selain beberapa hal tersebut, ibu juga mengerti dengan agama, memahami aturan agama, memelihara masyarakatnya dari hal-hal yang mendatangkan dosa.

Dalam masyarakat Minangkabau kehadiran seorang perempuan didalam keluarga sangat diharapkan. Jika tidak ada keturunan perempuan dalam suatu keluarga, dapat dikatakan garis keturunan keluarga tersebut terputus, alasannya karena dalam kekerabatan matrilineal, garis keturunan mengikuti garis keturunan ibu (perempuan).

Menurut garis kekerabatan matrilineal, pemilik harta di Minangkabau adalah kaum wanita. Laki-laki tidak berhak untuk memiliki harta pusaka, namun ia diberi kewajiban untuk mengembangkan harta tersebut. Harta pusaka adalah warisan yang menurut adat Minangkabau diterima dari mamak kepada kemenakan. Setiap harta pusaka selalu dijaga dan pelihara agar tetap utuh. Menjaga keutuhan harta pusaka ini berarti menjaga keutuhan kaum kerabat. Hingga harta ini dapat diturunkan kepada generasi berikutnya, sebagai penerus keturunan. Harta diturunkan dari mamak kepada kemenakan, kemenakan disini adalah kemenakan yang perempuan sebagai penerus garis keturunan. Kemenakan yang laki-laki tidak berhak untuk mendapatkan warisan tersebut. Walau demikian kemenakan yang laki-laki diberi kewajiban untuk menjaga dan mengembangkan harta pusaka tersebut. Dalam penggunaannya di atur oleh kaum perempuan.

Pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi perempuan dalam tatanan adat Minangkabau, seperti pendidikan Agama, budi pekerti dan basa basi, sampai menuntun menjadi seorang perempuan yang arif bijak bestari, merupakan hal utama yang harus dimiliki perempuan Minangkaabau. Menanamkan pengetahuan tentang harta pusaka serta batas-batas kepemilikannya serta penggunaan dari hasil yang terkandung di dalam maupun di atasnya, menjadi pegangan utama bagi kaum perempuan, demi menjaga kemaslahatan suku/kaumnya.

Pada prinsipnya perempuan Minangkabau memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan seluas-luasnya serta kesempatan untuk mengatur perekonomian kaum, semua berada dalam genggamannya. Maka, kaum perempuan juga disebut sebagai pemegang kunci peti perbendaharaan harta dan lumbung padi yang berada di setiap halaman Rumah Gadang. Sebagai seorang ratu, perempuan Minangkabau biasa diandaikan dengan sebutan Limpapeh Rumah Gadang. Menjadi penyumarak anjuang (ruang di atas Rumah Gadang).

Perempuan Minangkabau tidak boleh bicara sembarangan, apalagi bergunjing. Perempuan Minangkabau dilarang keluar rumah kalau tidak ada keperluan yang

sangat penting, tidak akan terjadi. Dalam tatanan Adat Minangkabau, jika terjadi permasalahan yang menimbulkan perselisihan, maka para pemuk adat dapat meminta pertimbangan bijaksana kepada kaum perempuan atau Bundo kanduang. Meskipun pada dasarnya pengendali dan pengelola Adat Minangkabau adalah laki-laki, namun ruang yang begitu besar serta kesempatan yang diberikan untuk memperoleh pengetahuan lebih besar memunculkan sikap yang arif bijaksana. Maka petuah yang telah dikeluarkan Bunda Kandung, menjadi acuan untuk sebuah keputusan dalam tatanan pemerintahan adat di Minangkabau.

#### E. Kesimpulan

- (1) Mengurangi jumlah wanita miskin justru akan memunculkan efek berganda dalam meningkatkan kesejahteraan anak, yang menjadi generasi masa depan. Kesejahteraan wanita menjadi penentu utama dalam mewujudkan korelasi positif antara pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan.
- (2) Orang Minangkabau harus menyadari nilai-nilai kearifan lokal tentang kedudukan dan fungsi Bundo kanduang yang amat luas dalam tatanan masyarakat saat ini sudah mulai bergeser dan terkikis, maka sudah saatnya untuk semua pihak menyadari perlunya penguatan lembaga Bundo kanduang dan lembaga sosial yang bergerak dalam masalah perempuan untuk memberi andil bagi hadirnya kesejahteraan bagi perempuan kini dan nanti.

#### Daftar Pustaka

- Amir, M.S, *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya. 2003.
- Fitri, Reni Mustika 2012, *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Rasio Gender Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Barat*, Tesis, UNP
- Hamka, *Adat Minangkabau dan Harta Pusakanya*. Padang : Semitar Hukum Adat Minangkabau. 1968.
- Naim, Muchtar (ed), 1968, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*. Padang : Center For Minangkabau Studies. 1968.
- Hanani, Silvia, 2008, Tanah Ulayat Dan Kemiskinan Perempuan Di Ranah Matrilineal, dalam Kafa'ah, Jurnal ilmiah Gender
- Hariani, Yefri, 2015, Perempuan dan Pendampingan Bantuan Hukum, dalam Workshop Kolaboratif Majelis Hukum dan HAM dan Majelis Kesejahteraan Sosial Pimpinan Aisyiah Wilayah Sumatera Barat
- Melyenti, Sri 2005, Akses Perempuan Miskin Terhadap Pelayanan Kesehatan Reproduksi, *Jurnal Antropologi*, UNAND Padang
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 2006. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006 – 2010:

Agenda 6 Mempercepat Penurunan Tingkat Kemiskinan. Padang;  
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Jayaputra Achmadi, 2012, *Pemetaan Kemiskinan dan Strategi Pengentasannya Berbasis  
institusi Lokal dan Berkelanjutan di Era Otonomi Daerah*, Puslitbang  
Kesos